

FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NAMA SKPD : DPM & PTSP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENANAMAN MODAL

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 	33 %	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 247 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Izin Penanaman Modal 2. SOP ttg Pengeboran Air Tanah 3. SOP ttg Izin Industri Dst ----	Ada 247 SOP	Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 570-422-2017 Tanggal 3 April 2017
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya 1 	100 %	- Perda ttg. Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang terisi sebanyak 24 - Jabatan yang ada, sebanyak 24 	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - 1 org kepala DPM & PTSP eselon II.a - 1 org sekretaris dan 5 org kepala bidang eselon III.a - 2 org kasubag dan 15 org kasi eselon IV.a Susunan jabatan struktural terlampir
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Fungsional Penerjemah 1 - Jabatan Fungsional Penerjemah 1 	100 %	- 1 org fungsional penterjemah Ahli Pertama
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 58 personil —Total PNS Provinsi personil	-
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 24 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org. 	100 %	Pejabat yg memenuhi syarat diklatpim : <ul style="list-style-type: none"> - 1 org pejabat eselon II.a Belum diklatpim II - 4 org pejabat eselon III.a sdh diklatpim III dan 2 org belum diklatpim III
								<ul style="list-style-type: none"> - 12 org pejabat eselon IV.a sudah diklatpim IV dan 5 org belum diklatpim IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt. 	100 %	Pangkat dan Jabatan terlampir
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renja SKPD 2. RKA SKPD 3. DPA SKPD	3 jenis dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD		<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program 	100 %	7 Program pada RPJMD : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								7 Program pada RPJMD : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	Program pada RENJA SKPD sama dengan Program RKA OPD
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	Program pada RKA SKPD sama dengan Program DPA OPD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 6.895.649.672.145,77,- 	0,25 %	Sesuai dengan laporan keuangan
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.328.971.400,- <ul style="list-style-type: none"> - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- 	7.72 %	Sesuai dengan laporan keuangan
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 195.700.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 11.590.583.854,- 	1,68 %	Sesuai dengan laporan keuangan
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 195.700.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- 	1.14 %	Sesuai dengan laporan keuangan
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan Keuangan ada, dengan 5 komponen, yaitu : 1.LRA 2.LO 3. Neraca 2. LPE 3. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	Laporan Keuangan hanya 1 jenis dengan 5 komponen di dalamnya, yakni : 1.LRA 2.LO 3. Neraca 2. LPE 3. CaLK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Buku Rekapitulasi aset	Ada	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 2018
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 170.282.700,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.667.405.417,00,- 	3.05 %	Sesuai dengan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 2018
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Website 2. Papan Pengumuman 3. Leaflet 4. Kotak Saran 5. Layanan Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Website 2. Papan Pengumuman 3. Leaflet 4. Kotak Saran 5. Layanan Pengaduan	Jumlah sebanyak 5 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPM & PTSP	3,27	Hasil Survey IKM tahun 2018

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001